

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA NEGERI BATIN KECAMATAN UMPU SEMENGGUK
KABUPATEN WAY KANAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Afriliawati Amalia
NPM: 1741020011**

Prodi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA NEGERI BATIN KECAMATAN UMPU SEMENGGUK
KABUPATEN WAY KANAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam
Ilmu Dakwah Dan Komunikasi

Oleh:

Afriliawati Amalia

NPM: 1741020011

Prodi: Pengembangan Masyarakat Islam



Pembimbing I : Prof. Dr. H. MA. Achlami, HS. MA

Pembimbing II : Dr. M. Mawardi J, M. Si

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial dalam masyarakat. Pembangunan Indonesia bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Banyak metode pembangunan, namun dalam penelitian ini akan membahas tentang pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat di Desa Negeri Batin serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah dari bentuk partisipasi masyarakat tersebut di Desa Negeri Batin. Pembangunan *Top Down* yang dinilai kurang efektif memicu munculnya pembangunan yang bersumber dari bawah atau biasa disebut *Bottom Up*. Melalui pendekatan ini diharapkan pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan efektif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Negeri Batin. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat dan pembangunan desa. Dalam partisipasi masyarakat, terdapat tiga lingkup partisipasi, yaitu partisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat. Didalam pembangunan desa, peningkatan partisipasi masyarakat dianggap sebagai pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dalam penyajian data penelitian yang didapatkan digambarkan dengan kata-kata. Dalam menentukan partisipan penelitian, penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu tehnik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan pendekatan triangulasi untuk mengecek keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dan objek penelitian. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan empat tahapan, yaitu 1). Pengumpulan data, 2). Reduksi data, 3). Penyajian data, 4). Penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis data, fungsi BPD di Desa Negeri Batin sudah berjalan baik, dimana fungsi BPD adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawas kinerja kepala Desa. Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat Desa Negeri Batin dinilai baik dalam lingkup perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, namun dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan partisipasi yang diharapkan masih kurang. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat, tingkat

pendidikan, maupun rasa saling memiliki yang kurang terjalin antar warga.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afriliawati Amalia
NPM : 1741020011
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NEGERI BATIN KECAMATAN UMPU SEMENGIK KABUPATEN WAY KANAN" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *fotenoot* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2023



Afriliawati Amalia
1741020011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di
Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk
Kabupaten Way Kanan**

**Nama : Afriliawati Amalia
NPM : 1741020011
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. MA. Achlam, HS. MA.
NIP. 195501141987031001

Dr. M. Mawardi J, M.Si.
NIP. 1966122199503100

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 19650817194031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan”** Disusun oleh **Afriliawati Amalia, NPM. 1741020011**, Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam** Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Pada Hari Rabu, Tanggal 01 Maret 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB, Tempat Ruang Sidang Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd

(.....)

Sekretaris : Evi Fitri Aglina, M.Pd

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jasmadi, M.Ag

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. M. A. Achlami HS, MA

(.....)

Penguji III : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Abdul Syukur, M.Ag

081196511011995031001

MOTTO

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْعَبْ

"Dan Hanya Kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan, dengan segala rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada Mamakku tersayang Dwi Arti dan Bapakku tercinta Hazim Yunius yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun mental sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini, terimakasih atas doa-doa yang tak pernah putus terkirim kepada penulis. Kepada Adikku Rifa Miftahudin yang sangat aku banggakan. Kepada Kakek dan Nenekku serta keluarga besar yang namanya tak didapat disebutkan satu persatu. Kepada seorang pemuda bernama Bobby Riyanda Pratama, terima kasih telah menemani dari awal hingga akhir penelitian ini.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna giver more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Afriliawati Amalia dilahirkan Di Desa Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 26 April 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Hazim Yunius dan Ibu Dwi Arti yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana S1.

Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 01 Negeri Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dari tahun (2005-2011), selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS PonPes Raudlatul Muta'allimin Kasui, Kabupaten Way Kanan, tahun (2011-2014). Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-Hikmah Way Halim, Bandar Lampung dari tahun 2014-2017 dengan mengambil jurusan IPA. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tepatnya pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah/skripsi yang sederhana ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Diiringi dengan itu Shalawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan”, penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisannya, untuk itu sumbangan kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan pada tahap selanjutnya. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka dengan itu, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
2. Bapak Drs. Mansur Hidayat, M. Sos. I, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Bapak Dr. H. Zamhariri, S. Ag, M. Sos. I selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. MA. Achlami, HS. MA selaku pembimbing I terimakasih atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. M. Mawardi J. M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengaruhnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepada Bapak Jarot, S. H selaku kepala Desa Negeri Batin, serta Staf Pemerintah Desa Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian di desa tersebut.
7. Sahabatku Azzah Jihan Riantika, Annisa Nurul Khoir, Uswatun Hasanah, Inayah Afidatur R dan Iin Lestari yang sudah mendukung dan memberikan kritikan saat proses penyelesaian skripsi.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas semuanya.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas amal kebaikan atas bantuan dan dukungan semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti menyadari keterbatasan kemampuan pada dirinya, untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya untuk membangun sangat diharapkan. Semoga sekripsi ini berguna bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2023

Afriliawati Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus pembahasan	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	
A. Partisipasi Masyarakat	25
1. Pengertian partisipasi masyarakat	25
2. Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan	28
3. Cara menggerakkan partisipasi	34
4. Bentuk-bentuk partisipasi	35
5. Tingkatan Partisipasi.....	36
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.....	37
7. Metode partisipasi	37
B. Pembangunan Desa	38
1. Pengertian Pembangunan Desa	38

2. Strategi Pembangunan.....	39
3. Sasaran Pembangunan Pedesaan	44
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa..	46

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA NEGERI BATIN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Batin	49
1. Sejarah Singkat Desa Negeri Batin	49
2. Visi Dan Misi Desa Negeri Batin.....	50
3. Letak Geografis Desa Negeri Batin.....	51
4. Jumlah Penduduk Desa Negeri Batin	53
5. Pelayanan Umum	56
6. Aparatur Pemerintahan Desa Negeri Batin	56
7. Infrastruktur Desa Negeri Batin	59
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	61

BAB IV FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	71
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Desa Negeri Batin.....	49
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan RW/Dusun.....	53
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan...	54
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi	55
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan	55
Tabel 3.6 Sarana Dan Prasarana Umum Desa.....	57
Tabel 3.7 Prasarana Pendidikan Desa Negeri Batin	58
Tabel 3.8 Sarana Dan Prasarana Ibadah Penduduk	58



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Negeri Batin.....	59
Bagan 3.2 Struktur BPD Desa Negeri Batin.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. SK Judul Penelitian
4. Kartu Konsultasi
5. Daftar Hadir Musrenbang Desa
6. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul proposal ini, dan menghindari kesalahpahaman maka perlu penulis menjelaskan beberapa kata atau kalimat judul proposal penelitian ini yang dimaksud adalah **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NEGERI BATIN KECAMATAN UMPU SEMENGIK KABUPATEN WAY KANAN"**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat di dalam judul proposal penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Isbandi Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi yaitu Keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan dengan diadakannya musyawarah sebelum kesepakatan diambil.

Menurut Djodjodigono, masyarakat mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit masyarakat adalah yang terdiri satu golongan saja. Sedangkan dalam arti luas masyarakat ialah kebulatan dari semua perhubungan yang mungkin dalam masyarakat. Jadi, meliputi semua golongan. Menurut Bouman dalam bukunya "Ilmu Masyarakat" mendefinisikan masyarakat salah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.²

¹ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), 26.

² M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* ,(Surabaya:Usaha Nasional, 2004), 21-22.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup diikat oleh norma yang sama dalam satu wilayah yang sama dan tujuan yang sama untuk memajukan desa. Dalam pembangunan desa, salah satu unsur yang berhubungan langsung dengan partisipasi masyarakat yaitu ada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalamnya.

Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.³

Dalam pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tentunya akan membahas pula apa itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. BPD adalah suatu lembaga yang dibentuk sebagai wadah atau sarana pendidikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menepatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan dengan serasi dan dapat keseimbangan. Dalam penelitian ini pembangunan yang dilakukan yaitu berkenaan dengan pembangunan sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud dengan judul di atas sebagai berikut : **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan”** merupakan penelitian yang mengkaji tentang program untuk pembangunan desa secara berkelanjutan yang melibatkan pihak

³ Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 9-11

lembaga pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat setempat yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan desa melalui sarana-sarana fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan, yang melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa.

B. Latar Belakang

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan secara global merupakan konsep yang sangat identik dengan tingkat laju pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan daya beli masyarakat. Disamping itu, pembangunan juga setara dengan semakin majunya peradaban masyarakat. Afifudin berpendapat bahwa banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jalan layang, gedung-gedung bertingkat dan sebagainya, padahal arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Siagian hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya memberikan definisi sebagai berikut : "Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa".

Pembangunan Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu arahan pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005–2025 seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah yang merupakan perwujudan pembangunan yang merata keseluruhan wilayah (RPJPN Tahun

2005-2025). Konsentrasi penduduk miskin terbesar di Indonesia terdapat di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Salah satu penyebab banyaknya penduduk miskin dipedesaan adalah sulitnya akses ke pedesaan.⁴

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.⁵

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program - program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. untuk itu masyarakat dituntut ikut serta dalam pembangunan.

⁴ Jayadinata TJ, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Desa, Perkotaan dan Wilayah*. (ITB, Bandung :1999, h. 256

⁵ Mahfudz, "*Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa*" *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, h. 11

Agar pembangunan berjalan sebagai yang kita harapkan, maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat sehingga strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran.⁶ Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut.⁷ Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Suatu pembangunan akan dikatakan berhasil apabila dalam setiap prosesnya melibatkan peran/partisipasi masyarakat didalamnya. Statement ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Petrus Lende Ngongo (2017) dalam penelitiannya menyatakan partisipasi masyarakat merupakan suatu pemberian sumbangan pikiran, sumbangan tenaga dan gagasan. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kegiatan di desa berjalan dengan baik apabila masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan.⁸ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hal tersebut karena keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.⁹

Desa Negeri Batin sebagai salah satu desa yang menerapkan UU No. 32 Tahun 2004, sebagai wujud penerapannya banyak program pembangunan yang dibuat dan didanai oleh Anggaran

⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 206

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit*, h. 17

⁸ Petrus Lende Ngongo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 3 (2017).

⁹ Dyah Putri Makhmudi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plpbk) Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang" *Jurnal Pengembangan Kota*, Volume 6 No. 2 (2018) <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

Dana Desa (ADD). Keberadaan Undang-Undang Desa tersebut memberikan ekspektasi lebih bagi pembangunan dan kemajuan serta kemandirian desa. Bagi masyarakat desa, keberadaan Undang-Undang juga memberikan semangat baru bagi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi atau ketirlibatan masyarakat secara langsung diharapkan mampu menambah akselerasi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil/pengawasan. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah kesadaran, keamanan, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah suatu lembaga yang dibentuk sebagai wadah atau sarana pendidikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. BPD timbul dari, oleh dan untuk masyarakat desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 06 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Dari konsep pemerintahan desa, dapatlah kita ketahui bahwa desa sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang di kelola oleh Kepala Desa yang difungsikan sebagai penjalan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang akan dilakukan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.¹⁰

Pembangunan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat

¹⁰ Undang-Undang NO. 06 Tahun 2014

sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan di Desa Negeri Batin. Namun, berdasarkan prasurvey yang dilakukan peneliti, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan tidak seperti yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat menghadiri Musrenbang desa Negeri Batin dan bertepatan dengan pelaksanaan program KKN tahun 2020, peneliti mengidentifikasi berbagai persoalan dalam proses pelaksanaannya. Diantaranya, dalam proses perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, bahkan saat Musrenbang keaktifan peserta dalam menyampaikan ide/gagasan program pembangunan desa relatif rendah. Tentunya dalam masalah ini perlunya peran BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk menyampaikan usulan atau ide terhadap pembangunan desa. Pemimpin desa yang masih mendominasi perumusan rencana prioritas pembangunan yang akan disepakati. Dalam pemanfaatan hasil program pembangunan, hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat tergolong tidak peduli akan hasil pembangunan. Sebagai contohnya adalah program pengadaan air bersih dengan pembuatan sumur bor, banyak keran-keran air yang patah, kamar mandi yang kotor bahkan mesin bor yang rusak namun tidak ada masyarakat yang peduli dan berusaha untuk mebenahi kerusakan tersebut. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil program pembangunan di Desa Negeri Batin.¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sulfikri selaku ketua BPD/BPK Desa Negeri Batin, fungsi BPD adalah sebagai wadah atau representasi warga terhadap pembanguna di desa. BPD Desa Negeri Batin menerima aspirasi masyarakat tentang kebutuhan mereka akan sarana dan prasarana, kemudian memusyawarakannya dalam MUSREMBANG Desa dan kemudian disetujui oleh Kepala Kampung agar dimasukkan dalam rencana pembangunan. BPD berusaha mewujudkan

¹¹ MUSRENBANG Desa Negeri Batin tahun 2021, *Observasi*, 20 Juli 2022

pemerintahan yang demokratis, selalu berupaya bekerja secara professional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dibebankan oleh masyarakat terhadap lembaga tersebut.¹²

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang partisipasi masyarakat dan peran BPD sebagai wadah atau sarana pendidikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. Sehubungan dengan hal ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan”.

C. Fokus dan Subfokus Pembahasan

Uraian diatas telah mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, oleh sebab itu penelitian difokuskan pada masalah terlebih dahulu sehingga tidak mengakibatkan perluasan pada masalah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Karena itu penelitian difokuskan kepada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.

Adapun sub-sub fokus penelitian yakni :

1. Fungsi BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam

¹² Sulfikri, Ketua BPD Desa Negeri Batin, *Wawancara*, 25 Juli 2022

pembangunan di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan pembangunan infrastruktur di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan dan kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dalam pembangunan desa di Desa Negeri Batin.
 - b. Untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Negeri Batin.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa manfaat dalam penelitian, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian skripsi diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu bidang Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya tentang konsep prtisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Secara praktis penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terutama bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

1. YUDHIANSYAH EKA SAPUTRA, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Dana Desa di kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau)*. Peneliti ini menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung melalui penggunaan dana desa secara keseluruhan masih dalam tingkat non partisipasi. Masyarakat yang tergolong masyarakat kurang mampu berada pada kriteria manipulasi, sedangkan masyarakat yang tergolong mampu sebagian besar berada pada kriteria terapi. Rendahnya partisipasi masyarakat ini di pengaruhi karena kurangnya kesempatan yang dimiliki sebagian masyarakat untuk turut serta dan ditambah dengan kemampuan dan kemauan masyarakat yang masih belum siap untuk mencapai tahap yang lebih tinggi.¹³
2. STEPANUS HENRYK, dengan judul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan sebelum undang-undang desa disahkan. Sementara saat ini undang-undang desa telah disahkan dan didalamnya diatur bahwa proses pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.¹⁴
3. MARTIANA DWI RAHAYU. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penguasaan Infrastruktur Di Desa Sinarsari*

¹³ <https://adoc.tips/queue/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa-kasus-html>, diakses pada hari Senin Tanggal 15 November 2021

¹⁴ <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=732>, diakses pada hari Senin Tanggal 15 November 2021

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan tahap evaluasi hasil-hasil pembangunan.¹⁵

H. Metode Penelitian

Agar mempermudah peneliti didalam melakukan penelitiannya dan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapa tkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

a. Pendekatan

Penelitian yang peneliti lakukan berupa penelitian deskriptif kualitatif . Penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data prilaku berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembanguna desa di Desa Negeri Batin dan pejabat pemerintahan Desa Negeri Batin.

¹⁵https://vdokumen.net/search.html?q=Partisipasi+Masyarakat+Pembangun+an+Pertanian&per_page=2, diakses hari Seni Tanggal 15 November 2021

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Afabeta, 2010), 2

¹⁷ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan, (Yogyakarta: Ar-ruz Media 2016), 22

b. Prosedur Penelitian

Prosedur ini bersifat penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi dan kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi factual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi, sehingga di peroleh gambaran yang jelas. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸

Penelitian deskriptif ini ditunjang oleh gambaran data dan informasi yang valid dengan yang ada dilapangan berupa kata-kata, gambar, atau dokumen lainnya. Sebagai upaya gambaran masalah yang diteliti. Dengan demikian maka penulis akan mendeskripsikan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengembangan kapasitas.

Bogdan dan Biklen, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa dengan cara mencari data yang asli melalui pengamatan dan wawancara. Setelah itu peneliti mendeskripsikan data yang sudah di dapat dan ditulis dalam laporan.

2. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kajian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan menggambarkan sebagaimana adanya tanpa diiringi dengan alasan, pandangan atau analisa dari penulis itu sendiri. situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari

¹⁸ Muhammad Nusa, Metode Penelitian,(Jakarta: fajar Agung, 1988), 8

informasi factual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga memperoleh gambaran yang jelas.¹⁹

Penelitian ini akan menggambarkan dan mengungkapkan data-data dan juga menganalisis data untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran tindakan aksi maupun kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat dalam bentuk upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Partisipan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang di perlukan.²⁰ Sedangkan menurut pandangan Sumarto partisipan yaitu:” Pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan, (tenaga dan pikiran, maupun materi) dan tanggung jawabnya disetiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya temuan yang telah ditentukan bersama.²¹ Adapun yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah aparatur Desa Negeri Batin yang sebanyak 11 orang, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) berjumlah 9 orang, dan Rukun Tetangga (RT) berjumlah 27 orang, dan masyarakat Desa Negeri Batin sebanyak 30 orang. Jadi, total partisipan dalam penelitian ini berjumlah 77 orang.

Maka dari itu untuk menentukan partisipan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia atau seseorang yang paling baik jika dijadikan penelitian. Dalam teknik *purposive sampling* pemilihan-pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

¹⁹ Wardhi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah,(Jakarta :Alpabeta 1997), 60

²⁰ J.Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta:Grasindo2013) , 49

²¹ <http://repository.upi.edu/17046/5/S KTP 1001835 Chapter3.pdf> diunduh pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 13:30

dipandang keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Ciri-ciri partisipan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

- a. Aparatur pemerintahan Desa Negeri Batin
 - 1) Aparatur desa yang mengetahui tentang perencanaan pembangunan desa Negeri Batin yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan BPD.
 - 2) Aparatur desa yang ikut dalam pelaksanaan pembangunan desa Negeri Batin.
- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Negeri Batin
- c. Masyarakat Desa Negeri Batin
 - 1) Masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah dalam pembangunan Desa Negeri Batin.
 - 2) Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Negeri Batin.
 - 3) Masyarakat desa Negeri Batin yang ikut dalam tahap evaluasi setelah pembangunan.

Berdasarkan kriteria di atas yang menjadi sampel adalah 3 orang perangkat desa, 3 orang anggota BPD, dan 7 orang masyarakat Desa Negeri Batin, sehingga yang menjadi total keseluruhan sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 13 orang.

4. Prosedur dan Pengumpulan Data

Data untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan.

- a. Jenis Data

Berdasarkan jenisnya penelitian ini menggunakan kualitatif. Secara terminologis, penelitian kualitatif

menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²² Menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²³ Kemudian menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Demikian halnya menurut Masrhall menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam observasi yaitu pengamatan langsung terhadap proses: *Place* (tempat dimana interaksi dalam situasi sedang berlangsung), *Actor* (pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu), *Activity* (kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung), *Object*

²² lexey J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4

²³ Ibid

(benda-benda yang terdapat di tempat itu), *Act* (perbuatan atas tindakan-tindakan orang tertentu), *Event* (rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang), *Time* (urutan kegiatan), *Goal* (tujuan yang ingin dicapai orang-orang), *Feeling* (emosi yang diraskana dan diekspresikan oleh orang-orang).²⁴

Dalam penelitian ini *place* yang di maksud akan bertempat di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, *actor* yang diteliti adalah para aparatur desa dan masyarakat desa Negeri Batin, *activity* yang diteliti adalah kegiatan pembangunan serta keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan tersebut, *object* yang diteliti adalah program pembangunan di desa Negeri Batin, *act* di dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, *event* yang di maksud adalah rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh *actor*, *time* menunjukkan urutan waktu kegiatan dilaksanakan, *goal* yang dimaksud adalah tujuan yang ingin dicapai oleh *actor*, *feeling* yang diteliti adalah perasaan yang dirasakan para *actor* dalam berlangsungnya kegiatan pembangunan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Esterberg dalam Moloeng, mendefinisikan interview sebagai berikut. “*a meeting of two persons to exchange information and idea trough and question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi

²⁴ Ibid, 229

²⁵ Ibid, 231

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (semistruktur interview), jenis wawancara ini sudah termasuk kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendapatkan informasi mengenai pengalaman, perasaan, pengetahuan, perspektif yang mereka alami serta mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti melakukan percakapan langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Perencanaan, dan BPD selaku aparat desa Negeri Batin serta masyarakat secara berhadapan muka untuk memperoleh data yang diinginkan, karena hal ini untuk mengetahui pendapat para partisipan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Negeri Batin.

c. Teknik Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita biografi, peraturan, kebijakan.²⁷

²⁶ Ibid, 233

²⁷ Ibid, 240

Dokumen yang dimaksud di sini adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.

Teknik dokumen ini dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui suatu data namun kegiatan tersebut sudah berlangsung sehingga peneliti tidak dapat hadir dan meneliti secara langsung kegiatan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan serta partisipasi masyarakat di Desa Negeri Batin yang sudah berlangsung sebelum peneliti melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis atau pengelolaan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Adapun metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

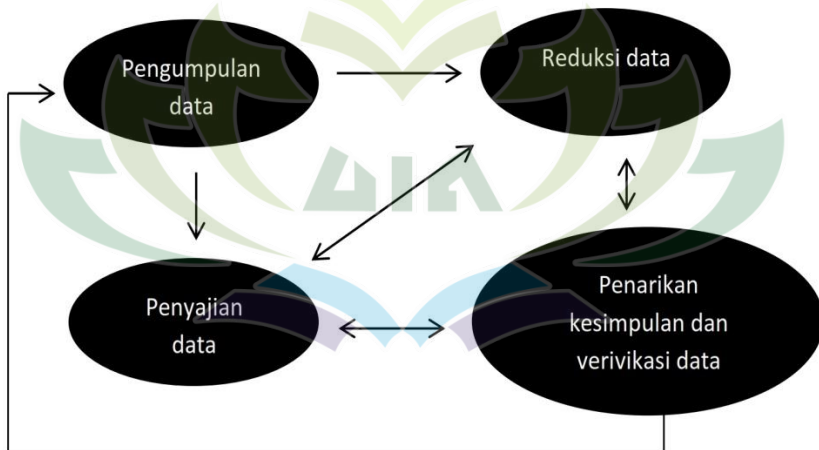
- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori dari data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan

pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.²⁸

Dari beberapa metode tersebut, dapat kita pahami bahwa ada yang mengemukakan proses, adapula yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu dalam suatu analisis data.²⁹ Adapun analisis data yang diperlukan adalah metode data deskriptif kualitatif dari Matthew B. Miles dan Michael Huberman, meliputi empat komponen, diantaranya:³⁰

- 1) Pengumpulan data
- 2) Reduksi data
- 3) Penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Gambar 1.1
Komponen analisis data model interaktif



Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Pers, 1992.

²⁸ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2006), 231

²⁹ Ibid.

³⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Pers), 1992, 15-20

Keterangan :

- a) Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- b) Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempercepat, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.
- c) Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah kepada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah langkah terakhir yang meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan kedalam penyajian data dengan cara logis dan mtodologi konfigurasi yang memungkinkan untuk diprediksi hubungan sebab akibat melalui hokum empiris.

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menguji keabsahan data agar data yang di kumpulkan akurat serta mendapatkan makna langsung terhadap tindakan dalam penelitian. Maka peneliti menggunakan Triangulasi data, yaitu proses penguatan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menjadi bukti temuan.³¹ Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi dalam kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.³² Teknik pengumpulan data Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan

³¹ Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 82

³² Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif..., 332

data yang sudah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan Triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang sama. Tujuannya bukan untuk mencapai kebenaran tentang beberapa fenomena. Tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁴

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan

³³ Sugiyono *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan (R&D).....*, 330

³⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1, 11

mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.³⁵

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana proses Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁶

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷ Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan cirri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif

³⁵ Ibid, 51

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, 5

³⁷ Ibid

adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.³⁸

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini bisa penulis maksudkan pada BAB I yang terdiri dari beberapa bagian seperti pada latar belakang berupa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Negeri Batin dan memunculkan pokok rumusan masalah pada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada program pembangunan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan merujuk beberapa teori pada BAB II terkait bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk menjadi acuan penulis dengan memperbanyak teori-teori sebagai referensi dalam menganalisis temuan berikutnya dari penelitian ini lalu penulis tuangkan di BAB III berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan, yang bersumber dari dokumentasi, observasi dan wawancara setelah itu hasil dari penemuan penulis analisis pada BAB IV terkait teori BAB II dan temuan data pada BAB III sehingga dapat dipadukan. Sehingga kegiatan ilmiah ini bisa terlihat secara sistematis dalam mencari korelasi antara keduanya secara teori dan fakta temuan yang nantinya menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran di BAB V berupa terjemahan penilaian subjektif peneliti dari variabel atas definisi operasional judul.

³⁸ Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982), 28



BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Aprillia Theresia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.¹

Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²

Britha Mikkelsen, mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan

¹ Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 198.

² isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), 27.

persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.

- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.³

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L., Gillin dan J.P Gillin sepakat bahwa istilah masyarakat adalah adanya saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identifikasi bersama.

Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Beberapa ahli yang lain juga memberikan definisi masyarakat yaitu :

- a. Ralph Linton mengatakan Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka

³ Briitha Mikkelesen, *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1999), h.64.

sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

- b. Mac Iver dan Page mengatakan bahwa Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.
- c. Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan pengertian tentang masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama.

Berkaitan dengan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, Bintoro Tjokoromidjojo menjelaskan bahwa:

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses penentua arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Ini bisa berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Dapat penulis simpulkan partisipasi masyarakat adalah Suatu tindakan keikutsertaan masyarakat didalam kegiatan pembangunan desa untuk terlaksananya pembanguann desa yang efektif dilakukan dengan musyawarah agar sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

2. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Telaahan tentang pengertian “Partisipasi” yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan suka rela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai karena itu, Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan.

“Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relative terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program yang ada dimasyarakat”.⁴

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Dengan penyusunan program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilakukan secara optimal.⁵

Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan:

- 1) Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- 2) Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (fore casting) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Desa Partisipatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Cetakan Pertama, 34

⁵ Ibid, 35

prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi, perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
- 4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya

b. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

c. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam

banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir dapat terus dinikmati memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya).⁶

d. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sebagai diperlukan.

e. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki

⁶ *Ibid*, 83.

mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesekurelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.⁷

Menurut Theresia (2014) terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauaan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan alokasi anggaran dan sumber daya lokal) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

2) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukrela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang berada di atasnya (yang umumnya terdiri dari orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat

⁷ *Ibid*, 84

dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangun harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

3) Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.⁸

⁸ Siti Hajar, et. al, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH AQLI, 2018), 34

3. Cara Menggerakkan Partisipasi

Perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi. Agar perbaikan kondisi dan peningkatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa tersebut.

Selain cara-cara diatas, partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui:

- a. Proyek pembangunan desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b. Organisasi dan lembaga kemasyarakatannya yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (BPD/BPK).
- c. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian mereka di Jamaica, Goldsmith dan Blustain berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

- a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam partisipasi masyarakat berlaku juga prinsip pertukaran dasar (basic exchange principles). Salah seorang pemuka teori pertukaran (exchange theory) tersebut, Peter M. Blau berpendapat, bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu. Partisipasi masyarakat sebagai masukan

pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan.

Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut beberapa sumber, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dan perlu dibedakan. Masyarakat desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri. Rasa tanggung jawab sebagai salah satu kualitas lainnya, masyarakat desa yang berkemampuan berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan pada hal yang lebih besar, mempunyai keyakinan akan kemampuannya sendiri atau berkesempatan memutuskan sendiri apa yang dikendaki.

4. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Peran serta masyarakat antar satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan. Perbedaan wujud partisipasi ini kemudian akan memunculkan beberapa bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Ndraha berpendapat bahwa partisipasi bentuknya dapat berupa: kontak sosial dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima maupun menolaknya, partisipasi dalam perencanaan dan penetapan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam

menerima, memelihara dan mengembangkan program pembangunan.

Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.⁹

5. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, menurut Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- a. Memberikan informasi (information)
- b. Konsultasi (consultion) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memmmberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut
- c. Pengambilan keputusan bersama (deciding together), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang diperlukan guna pengambilan keputusan
- d. Bertindak bersama (acting together), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan
- e. Memberikan dukungan (supporting independet community interest) dimana kelompok-kelompok

⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), 84.

lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.¹⁰

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Salah satu yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama oleh para cendekiawan akhir-akhir ini dikemukakan perlunya diberikan perhatian terhadap aspek dan pemerataan pembangunan.¹¹ adapun factor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ekonomi dan pendidikan.

7. Metode Partisipasi

Metode partisipasi merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpulan data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya jawab dengan responden. Terdapat banyak teknik pengumpulan data partisipasi. Terdapat 4 (empat) diantaranya:

- a. Penelitian dan Aksi partisipasi (*Participatory Research and Action*). Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (tanaman, biji-bijian, tongkat) sebagai alat petunjuk pendataan sehingga memudahkan masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi.

¹⁰*Ibid*, 86.

¹¹Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 208.

- b. *Stakeholder Analysis*. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi dilingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk menentukan apa masalah dan kebutuhan suatu organisasi, kelompok, atau masyarakat setempat.
- c. *Beneficiary Assessment*. Pengidentifikasi masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial. Tujuan utama pendekatan adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif pembangunan, dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan.
- d. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi (*Participatory monitoring and Evaluation*). Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi.¹²

B. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pada hakikatnya pengertian pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara yang lain.

¹² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Op, Cit.* 82-83.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatannya yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan).¹³ Sedangkan menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakhri mendefinisikan pembangunan yang dikaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerak menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.¹⁴ Menurut Siagian pembangunan adalah Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).¹⁵

2. Strategi Pembangunan

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah:

- a. Pembangunan pertanian (*agricultural development*)
- b. Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)
- c. Pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)

¹³ Bintoro Tjokroamidjojo, *Op.Cit.*, 189.

¹⁴ Masril Karim, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan*, (Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi, Program Universitas Tidore), Ternate, 2010. <http://www.google.com> diakses pada tanggal 22-11-2021, Pukul 10.30 WIB.

¹⁵ Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Gunung Agung, 2007), 2

d. Strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*)

Uraian berikut berusaha membahas secara ringkas asumsi-asumsi dasar, sasaran dan bagaimana pelaksanaan program-program tersebut, serta beberapa hambatan ketika diimplementasikan.

a) Pembangunan Pertanian (*agricultural development*)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan pangan (baik dipedesaan maupun diperkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju.

Implementasi program pembangunan pertanian ini telah merombak sistem pertanian dan model usaha tani. Karena itu, lahir sebutan *green revolution* (revolusi hijau). Di Indonesia, seperti telah diutarakan dalam uraian terdahulu, program pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah Orde Baru secara intensif pada Pelita 1 telah membuahkan hasil yang spektakuler. Indonesia yang semula tergolong pengimpor beras nomor satu di dunia menjadi negara berswasembada pangan.¹⁶

b) Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dipedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja. Prospek program ini

¹⁶ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 40-41.

diyakini cukup cerah antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan tidaklah terlalu sukar sehingga mudah mengajak anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif,
2. kebutuhan investasinya terjangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat desa sehingga bisa merata kesegnap lapisan masyarakat,
3. bahan baku produksi dapat ditekan,
4. dapat dikerjakan secara komplementer dengan kegiatan produksi lainnya (sambil bertani).

Program ini dalam implementasinya menjumpai beberapa hambatan sehingga sukar mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan tersebut antara lain terletak pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat desa sendiri. Anggota masyarakat desa terkesan kurang siap menyongsong industrialisasi. Mereka pada umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang pernah dicapai. Mereka juga kurang berani mengambil resiko, dan oleh karenanya sulit didorong untuk melakukan reinvestasi. Keterampilan mereka yang dipergunakan sederhana, kapasitas produksinya terbatas, dan manajemennya pun lemah sehingga sangat sukar meningkatkan kualitas produksinya.¹⁷

Hambatan lain adalah tiadanya organic link antara sektor besar dengan sektor yang lebih kecil. Mereka tampak berjalan sendiri-sendiri, saling berkompetensi, dan sukar melembagakan kerjasama dalam meningkatkan proses produksi, introduksi teknologi baru maupun dalam memasarkan hasil produksi. Malah ketika para pemilik modal menanamkan investasinya didesa, yang berkembang kemudian bukanlah industri pedesaan tetapi industri kapital intensif yang berada dalam setting desa. Industri semacam ini tidak menciptakan banyak kesempatan kerja, terutama karena anggota masyarakat desa tidak memiliki keterampilan yang

¹⁷ *Ibid*, 44

cukup untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Sumber daya mereka lemah.

c) Pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Waterston, ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan semacam ini, yaitu: (a) pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya (*labour intensive*), (b) memperluas kesempatan kerja, (c) intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan, (d) mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan, dan (f) membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek multi sektor.

Prinsip-prinsip serupa juga pernah dilontarkan oleh „Rehovot School“ dalam mendekati pembangunan masyarakat desa terpadu, yang antara lain mencakup:

1. Pertumbuhan pertanian sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan pedesaan, (meliputi: diversifikasi usaha tani, keluarga tani sebagai unit organisasi, perkembangan simultan sistem penyangganya, organisasi oleh dan untuk petani, sert industrialisasi pedesaan)
2. Urbanisasi sebagai faktor promosi bagi pembangunan pedesaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini lebih menekankan transformasi sektor pertanian sebagai *the prime mover*. Transformasi tersebut adalah perubahan secara gradual (tetapi pasti) dari pertanian subsistence menjadi pertanian komersial. Pendekatan ini juga mengamjurkan adanya fusi atau gabungan dari strategi top-down dan strategi bottom-up. Strategi top-down dianggap terlalu banyak diwarnai oleh pemaksaan, sementara strategi bottom-up dianggap terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan

yang terdapat ditingkat bawah. Itulah sebabnya penggabungan dua macam strategi tersebut diyakini akan banyak mendatangkan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat.

d) Strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*)

Salah satu elemen yang terabaikan dalam program-program pembangunan pedesaan yang telah didiskusikan (terutama program pembanguann masyarakat desa terpadu) adalah ruang (space). Program-program tersebut lebih memberi tekanan pada perencanaan dan implementasi proyek saja, dan kurang memperhatikan keterkaitan letak proyek tersebut dengan ruang pengembangan ekonomi yang lebih luas, terutama dengan letak atau posisi kota. Itulah sebabnya berbagai macam infrastruktur dan fasilitas terkesan dibangun hanya untuk kepentingan proyek itu sendiri, tanpa memperhatikan jarak ideal denga kota dalam fungsinya sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produk.

Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah ini. Cara yang ditempuh adalah membangun atau megembangkan sebuah pasar didekat desa. Pasar ini fungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen, atau lazim disebut dengan the centres of „demonstration effect“ of customer goods. Informasi semacam itu besar sekali maknanya bagi pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi gamblang dalam mengembangkan usaha.

Pusat pertumbuhan semacam itu diupayakan agar dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara sosial tetap dekat denga desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ini disamping secara langsung dapat menjawab berbagai persoalan pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian, juga dapat dikelolsesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa. Pengelolaan semacam ini akan

mengurangi ketergantungan dan sangat dibutuhkan bagi pengembangan kewiraswastan. Pusat pertumbuhan itu akan melahirkan sebuah komunitas desa kota (urban), yang ditandai dengan kemauan untuk menerima prinsip-prinsip ekonomi uang namun tetap tidak kehilangan nilai-nilai juga sesuai dengan iklim usaha masyarakat desa. Pusat pertumbuhan itu juga tidak terlalu besar, sehingga setiap perkembangan yang mengarah pada lahirnya monopoli oleh kelompok ekonomi kuat dapat segera dikontrol dan dihindari.

Banyak pengamat melihat bahwa strategi pusat pertumbuhan ternyata juga kurang begitu berhasil meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Konsep pusat pertumbuhan ternyata tidak melahirkan pemukiman baru dengan komunitas berkarakter yang dibayangkan masih mempertahankan nilai-nilai desa tetapi mau menerima nilai-nilai kota. Yang justru tumbuh adalah sebuah reartikulasi pola pemikiran desa, yang dihuni oleh orang dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang hadir bersama dengan program tersebut.

3. Sasaran Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Sasaran umum yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (agricultural resource based) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus sebagai berikut :

- a. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar seluruh wilayah.

- b. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisien yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- c. Tercapainya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.¹⁸
- d. Konsep Perencanaan Pembangunan dari Bawah (*Bottom Up Planning*)

Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari keterlibatan peran serta Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pedesaan harus diletakkan dalam konteks: (1) sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) sebagai upaya mempercepat dan memperkokoh pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh.

Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. Karena dana atau anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembanguann yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan : (1) penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan proritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur, dan (2) didukung

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit.*, 23-24.

oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut *bottom up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) secara nyata dan terarah.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerah tersebut.

Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain, mereka bersedia menyerahkan sebagai lahan/tanahnya yang dilewati oleh pembangunan jalan desa atau jaringan irigasi, tanpa meminta pembayaran ganti rugi harga lahan/tanah tersebut, kerja bersama-sama dalam pembangunan jalan desa (tanpa diberikan upah), dan lainnya.¹⁹

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

¹⁹ *Ibid*, 25.

Menurut Slamet partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.²⁰

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.²¹

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana

²⁰ Suryono, Agus, *Teori dan Isi Pembangunan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, UM Press, 2001), 124

²¹ Supriady, Deddy dan Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: SUN, 2005), 16

pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.²²



²² Isbandi, Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Depok: Fisip UI press, 2007), 27

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*, Yogyakarta: Ar-ruz Media
- Aprillia Theresia, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Aziz Muslim, 2009, *Metedologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras Kompleks Ri Gowok Blok D 2 No. 186
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Britha Mikkelesen, 1999, *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Emzir, 2010, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Isbandi Rukminto Adi, 2003, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada
- J.Raco, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo
- Lexy J. Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Cholil Mansyur, 2004, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional

- Muhammad Nusa, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: fajar Agung
- Profil Desa Negeri Batin Tahun 2022
- Rahardjo Adisasmata, 2006, *Pembangunan Desa Partisipatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Cetakan Pertama
- Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, 1982, *Qualitative Reseach for Eduication*, London: Allyn & Bacon, Inc
- Siagian, Sondang P, 2007, *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Gunung Agung, 2007
- Siti Hajar, et. al, 2018, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli
- Subandi, 2011, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sunyoto Usman, 2003, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Supriady, Deddy dan Riyadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Derah* (Jakarta: SUN
- Suryono, Agus, 2001, *Teori dan Isi Pembangunan*, Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta
- Wardhi Bachtiar, 1997, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta :Alfabeta 1997

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Dyah Putri Makhmudi, 2018, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plpbk) Di*

Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang" Jurnal Pengembangan Kota, Volume 6 No. 2
<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

Mahfudz, 2009, *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1

Masril Karim, 2010, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan*, (Skripsi Progam Studi Ilmu Adminitrasi, Program Universitas Tidore), Ternate, 2010.
<http://www.google.com> diakses pada tanggal 22 November 2021

Petrus Lende Ngongo, 2017 "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*", JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 3

Rifka Linda Singal, 2017, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Jurnal Pembangunan Desa

Thomas, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Pemerintahan Integratif

Sumber Online

<https://adoc.tips/queue/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa-kasus.html>, diakses pada hari Senin Tanggal 15 November 2021

<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=732>, diakses pada hari Senin Tanggal 15 November 2021

<https://vdokumen.net/search.html?q=Partisipasi+Masyarakat+Pembangunan+Pertanianp2> diakses hari Senin Tanggal 15 November 2021